

**TESIS**  
**KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK MILIK YANG BERADA DALAM**  
**KAWASAN HUTAN PRODUKSI KONVERSI PASCA BERLAKUKANYA**  
**PERDA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA TATA RUANG**  
**WILAYAH PROVINSI RIAU DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna*

*Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*



Oleh:

**IRWAN SAPUTRA**

**NIM : 2120123031**

**Komisi Pembimbing :**

**Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H.,M.Hum.**

**Dr. Syofiarti, S.H.,M.Hum.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

**KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK MILIK YANG BERADA DALAM  
KAWASAN HUTAN PRODUKSI KONVERSI PASCA BERLAKUKANYA  
PERDA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH PROVINSI RIAU DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

*Irwan Saputra, 2120123031, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas  
Andalas, Tahun 2023*

**ABSTRAK**

Didalam UUPA untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah milik masyarakat, maka pemerintah melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah. Dengan pendaftaran tanah, pemegang hak atas tanah akan menerima tanda bukti hak atas tanahnya yakni Sertipikat. Sehingga dengan Sertipikat itu pemegang hak atas tanah akan terjamin eksistensi haknya. Namun pada saat ini sering kali menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat karena meski sudah memiliki Sertipikat yang sah namun jaminan kepastian hukum bagi pemegangnya masih kurang. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038. Rumusan masalah dalam penelitian ini pertama Bagaimana Perindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan Produksi Konservasi, kedua Bagaimana Kepastin Hukum Status Sertipikat Hak Milik Pada Kawasan Hutan Produksi Konservasi Sejak Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Hasil Penelitian Pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah dalam hal ini negara tidak menjamin mutlak yaitu mengenai data yang disajikan dalam sertipikat karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem campuran yaitu sistem publikasi negatif bertendens positif (Pasal 32 ayat (2) PP 24 tahun 1997) yang berarti bahwa selama tidak ada orang lain yang mengajukan gugatan kepengadilan yang merasa lebih berhak maka data dalam sertipikat adalah tanda bukti hak yang kuat (Pasal 19 ayat (2) UUPA), , maka dengan terciptanya kepastian hukum tentu telah memberi perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat hak atas tanah. Demikian juga halnya sertipikat di akui dan dijamin sekalipun dalam kawasan hutan sebab hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat (pasal 5 ayat (1) UUK). Perlindungan Hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah di dalam Kawasan hutan lindung di Kabupaten Kuantan Singingi, Preventif yaitu: 1. Pemberian Surat Keterangan Status Lahan, 2. Melakukan pendataan masyarakat secara rutin, 3. Melakukan penyuluhan. Represif, yaitu: a. pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan, b. pelepasan melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; c. memberikan akses pengelolaan Hutan melalui program Perhutanan Sosial; atau d. Penggunaan Kawasan Hutan.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Sertipikat, Hak Milik, Kawasan Hutan

**CERTIFICATE OF OWNERSHIP RIGHTS IN THE CONVERSION  
PRODUCTION FOREST AREA POST THE ENFORCEMENT OF  
REGIONAL REGULATION NUMBER 10 OF 2018 CONCERNING SPATIAL  
PLAN FOR THE RIAU PROVINCE IN KUANTAN SINGINGI DISTRICT**

*Irwan Saputra, 2120123031, Master of Notary, Faculty of Law, Andalas University,  
2023*

**ABSTRACT**

In the UUPA, to provide legal certainty regarding community land rights, the government carries out land registration activities. With land registration, land rights holders will receive proof of their land rights, namely a certificate. So with the Certificate the holder of land rights will be guaranteed the existence of their rights. However, at this time it often causes concern for the public because even though they already have a valid certificate, the guarantee of legal certainty for the holder is still lacking. Things like this can be seen from the problems that occur in Kuantan Singingi Regency. Production Forest Designation Area under the provisions of Article 30 paragraph (1) Riau Province Regional Regulation No. 10 of 2018 concerning Riau Province Regional Spatial Planning for 2018-2038. The formulation of the problem in this research is first, how is the legal protection for ownership of property rights certificates included in conservation production forest areas, second, how to determine the legal status of property rights certificates in conservation production forest areas. Since the enactment of Riau Province Regional Regulation no. 10 of 2018 concerning the Riau Province Regional Spatial Planning Plan for 2018-2038. The research method used in this research is empirical juridical. Research Results: Regulation of legal protection for land title certificate holders, in this case the state does not provide absolute guarantees regarding the data presented in the certificate because the land registration system in Indonesia adheres to a mixed system, namely a negative publication system with a positive tendency (Article 32 paragraph (2) PP 24 of the year 1997) which means that as long as there is no other person who files a court action who feels more entitled, the data in the certificate is a sign of strong evidence of rights (Article 19 paragraph (2) UUPA), then by creating legal certainty it will certainly provide legal protection to holder of a land title certificate. Likewise, certificates are recognized and guaranteed even in forest areas because private forests located on land that is burdened with ownership rights are commonly called community forests (article 5 paragraph (1) UUK). Legal protection for land ownership holders in protected forest areas in Kuantan Singingi Regency, Preventive, namely: 1. Providing land status certificates, 2. Carrying out regular community data collection, 3. Carrying out outreach. Repressive, namely: a. release of land plots in Forest Areas through changes in Forest Area boundaries, b. release through Changes in Forest Area Designation and Changes in Forest Area Functions; c. providing access to forest management through the Social Forestry program; or d. Use of Forest Areas.

**Keywords:** *Legal Certainty, Certificates, Property Rights, Forest Areas*